



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Muh.Krg.Bonto No.30 Telp. (0414) 21029 Kode Pos 92812
BENTENG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

A. INFORMASI BERKALA

NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	LINK DOKUMEN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Visi Misi	Memuat Visi dan Misi BPBD dalam pencapaian Target	Kepala Sub Bagian Hukum Perencanaan & Pelaporan	Benteng/24 Mei 2023	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/
2	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kepala Sub Bagian 5. Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Benteng/Januari 2023	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/
3	Sumber Daya Manusia yang Dimiliki	Komposisi Pegawai BPBD di awal tahun 2023	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Benteng/Januari 2023	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/



4	Tugas, Wewenang dan Fungsi	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPBD	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Benteng/Januari 2021	hardcopy	Selama berlaku	http://www.bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/
5	Penanggung Jawab dan Pelaksana Program	PPTK adalah pejabat pada SKPD/Unit SKPD yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu tugas dan wewenang PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Benteng/Januari 2023	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/
6	Sk PPID Pembantu	untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Benteng/Januari 2023	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/
7	Anjab/ABK	Dokumen yang memuat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja BPBD Tahun 2023	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Benteng/Februari 2023	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/
8	Standar Operasional Prosedur BPBD Tahun 2023	Standar Operasional Prosedur BPBD Tahun 2023 adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi	Kepala Sub Bagian Hukum Perencanaan & Pelaporan	Benteng/Januari 2023	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/

		pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan					
9	DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran	Kepala Sub Bagian Hukum Perencanaan & Pelaporan	Benteng/Februari 2023	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbdd.kepulauanelayarkab.go.id/
10	RKA	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD	Kepala Sub Bagian Hukum Perencanaan & Pelaporan	Benteng/Februari 2023	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbdd.kepulauanelayarkab.go.id/
11	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang	Kepala Sub Bagian Hukum Perencanaan & Pelaporan	Benteng/Januari 2023	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbdd.kepulauanelayarkab.go.id/

		disertai dengan indicator kinerja					
12	LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD 2022 berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban BPBD yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi	Kepala Sub Bagian Hukum Perencanaan & Pelaporan	Benteng/Januari 2023	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/
13	Renstra 2021-2026 BPBD	Dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis	Kepala Sub Bagian Hukum Perencanaan & Pelaporan	Benteng/22 September 2021	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/
14	RENJA	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA OPD merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode	Kepala Sub Bagian Hukum Perencanaan & Pelaporan	Benteng/Januari 2023	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/

		jangka pendek satu tahun ke depan					
15	LKPJ	Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan good governance sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Hukum Perencanaan & Pelaporan	Benteng/Januari 2023	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbid.kepulauanselayarkab.go.id/
16	LPPD	memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	Kepala Sub Bagian Hukum Perencanaan & Pelaporan	Benteng/Januari 2023	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbid.kepulauanselayarkab.go.id/

		Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2022					
17	Laporan Keuangan	Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber Daya	Kepala Sub Bagian Keuangan	Benteng/Januari 2023	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbid.kepulauanelayarkab.go.id/
18	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyediakan berbagai informasi mengenai realisasi anggaran, pembiayaan, belanja dan lain sebagainya dan membandingkannya dengan jumlah anggaran di dalam suatu periode	Kepala Sub Bagian Keuangan	Benteng/31 Desember 2022	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbid.kepulauanelayarkab.go.id/

19	Neraca	Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitastersebut pada akhir periode tersebut	Kepala Sub Bagian Keuangan	Benteng/31 Desember 2022	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/
20	Laporan Operasional	Komponen Laporan Operasional SKPD yang terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit-LO, dikonsolidasikan dengan Laporan Operasional PPKD yang terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit-LO, menjadi Laporan Operasional Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Keuangan	Benteng/31 Desember 2022	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/
21	Laporan Perubahan Ekuitas	Komponen Laporan Perubahan Ekuitas SKPD yang terdiri dari Ekuitas (awal), Surplus/Defisit-LO, Koreksi pada Ekuitas, dan Ekuitas (akhir) dikonsolidasikan dengan Laporan Perubahan Ekuitas PPKD yang terdiri dari Ekuitas (awal), Surplus/Defisit-LO, Koreksi pada Ekuitas, dan	Kepala Sub Bagian Keuangan	Benteng/31 Desember 2022	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/

		Ekuitas (akhir), menjadi Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah					
22	CALK	Catatan Atas Laporan Keuangan memuat deskripsi dan penjelasan atas unsur-unsur yang tersaji pada lembar muka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Keuangan	Benteng/31 Desember 2022	Softcopy	Selama berlaku	http://www.bpbk.kepulauanselayarkab.go.id/
23	Kajian Resiko Bencana	Catatan atas resiko bencana sebagai tahap pencegahan terhadap bencana	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Benteng, awal tahun berjalan	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku	
24	Rancangan Penanggulangan Bencana	Catatan atas penanganan bencana dari resiko bencana sebagai tahap pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Benteng, awal tahun berjalan	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku	
25	Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	Catatan atas Penanggulangan bencana menyangkut kebutuhan pasca bencana	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Benteng, awal tahun berjalan	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku	
26	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Catatan atas Penanganan Pasca Bencana	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Benteng, awal tahun berjalan	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku	

B. INFORMASI SERTA MERTA

NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	LINK DOKUMEN
1	Update Perkiraan Cuaca dari BMKG	Cacatan atas perkiraan cuaca mulai harian dan mingguan oleh sistem yang tersedia dari BMKG	Operator BMKG	Benteng, secara serta merta	Softcopy	Selama berlaku atau dalam Keadaan Tertentu	https://www.bmkg.go.id/cuaca/prakiraan-cuaca-indonesia.bmkg
2	Update perkiraan gempa bumi dan tsunami Indonesia	Catatan atas kejadian Gempa Bumi dan Tsunami Indonesia Oleh sistem Inatews yang tersedia	Operator Inatews BMKG	Benteng, secara serta merta	Softcopy	Selama berlaku atau dalam Keadaan Tertentu	https://inatews.bmkg.go.id/
3	Surat Keputusan Bupati tentang Kedaan Tanggap Darurat Bencana	Catatan atas keadaan tanggap darurat bencana oleh Keputusan Bupati Kepulauan Selayar	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Benteng, secara serta merta saat kejadian bencana	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku atau dalam keadaan tertentu	http://www.bpbdd.kepulauanelayarkab.go.id/
4	Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana	Catatan atas Pernyataan Bupati Kepulauan Selayar tentang Keadaan Tanggap Darurat	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Benteng, secara serta merta saat kejadian bencana	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku atau dalam keadaan tertentu	http://www.bpbdd.kepulauanelayarkab.go.id/



		Bencana					
--	--	---------	--	--	--	--	--



C. INFORMASI SETIAP SAAT

NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	LINK DOKUMEN
1	Renstra 2021-2026 BPBD	Dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis	Kepala Sub Bagian Program	Benteng/22 September 2021	Softcopy dan hardcopy	Selama Berlaku	http://www.bpbdd.kepulauanelayarkab.go.id/
2	RENJA	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA OPD merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan	Kepala Sub Bagian Program	Benteng/Januari 2023	Softcopy dan hardcopy	Selama Berlaku	http://www.bpbdd.kepulauanelayarkab.go.id/



D. INFORMASI DIKECUALIKAN

LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Keuangan - Dokumen Keuangan : a. DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran OPD b. Pertanggungja waban Keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan D7 (2)	Menghambat Proses Penegakan Hukum Mengganggu kepentingan perlindungan hak Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku Selama masih berlangsung penyelenggaraannya selama status perlindungan masih berlaku
Laporan Keuangan sebelum diaudit	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf J	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf g, huruf l, dan huruf j dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)	Sampai terbitnya Laporan Keuangan yang telah di audit



Surat Keputusan Bupati tentang daftar Korban Bencana dan Penerima Bantuan Bencana By Name By Addres	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf J	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf g, huruf l, dan huruf j dipidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi : - Arsip dokumen kepegawaian - Identitas PNS yang melanggar/dijatuhi hukuman disiplin - Identitas PNS yang mengajukan izin	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang

Benteng, 29 Februari 2024
Kepala Pelaksana BPBD,

^

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM., Pub.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19700726 199101 1 002





**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code